

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara luas yang dibagi atas beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang masing-masing mengelola tata pemerintahannya sendiri sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan azas desentralisasi. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bertahap dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota dengan maksud dan tujuan yang diharapkan adalah memberikan kemandirian dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang hidup dalam wilayah tersebut dengan prakarsa sendiri dan berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipindahkan dalam

upaya penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas sangat dominan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan anggaran daerah (APBD).

Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Apabila hasil suatu layanan telah mencapai dampak yang diharapkan atau ditargetkan melalui perbandingan antara *ouctume* dengan *output* maka dapat dikatakan organisasi telah berjalan dengan efektif. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan juga sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan.

Menurut Zazami, Faiz, Ihda A.F, dan Mukhlis (2013:1) bahwa audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen

dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan.

Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika fungsi audit internal berjalan dengan baik.

Audit internal mempunyai 3 (tiga) peran di dalam perusahaan, yaitu sebagai *watchdog*, konsultan, dan katalis. Dari ketiga peran tersebut audit internal dapat melihat aktivitas dalam perusahaan sudah berjalan sesuai peraturan dan kebijakan organisasi, audit internal juga berperan memberikan saran-saran yang dapat membantu manajemen untuk meningkatkan efektivitas intern perusahaan. Audit internal yang independen sangat penting dalam perusahaan untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Harapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempertahankan predikat Laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) kandas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan pelaporan Rp53 miliar belum lengkap. Keputusan LHP dibacakan Moermadi Soerja Djanegara, anggota BPK RI untuk wilayah Jawa dan Bali, dalam

sidang Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Kamis, 18 Juni 2015. BPK menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terhadap Keuangan Pemprov Jatim 2014 hanya mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pemeriksaan penggunaan APBD Jatim tahun 2014, hasilnya tidak seperti LHP BPK tahun 2013. Penilaian opini laporan keuangan dan permasalahan pengendalian internal SKPD masih ditemukan kelemahan pengendalian kas. Itu terjadi pada sisi pengeluaran maupun penerimaan, sehingga mengakibatkan setoran kas dan penerimaan kas yang tidak sah serta menimbulkan ketidak wajarannya. Temuan kedua, realisasi pertanggungjawaban belanja barang dan jasa senilai Rp 21,56 miliar kepada 23 SKPD yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Anggaran sebesar Rp 31,45 miliar kepada sepuluh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Jika ditotal ada sekitar Rp 53 miliar penggunaan anggaran yang perlu dibenahi (BPK, 2017)

Fenomena yang berkembang dalam pengelolaan keuangan di berbagai daerah menunjukkan masih adanya permasalahan belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena berbagai faktor seperti pemahaman yang relatif kurang dari para pengelola (pejabat penatausahaan keuangan), peraturan tentang keuangan yang sering kali terjadi pembaharuan di pemerintah (pusat), belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan, dikarenakan relatif lemahnya pengawasan serta tindak lanjut khususnya untuk audit internal. Masih tidak praktisnya penyaluran dana dalam penyerapan anggaran dana.

Telah terdapat penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapat bahan perbandingan dan acuan yang dapat memperjelas bahasan, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil	Perbedaan
1.	Novi Andiani (2012)	Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah	Sedangkan penulis lebih akan memfokuskan pada pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kota Sukabumi
2.	Siti Nurjannah Saleba (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Sedangkan penulis lebih akan memfokuskan pelaksanaan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah di kota Sukabumi
3.	Ami Oktaviana (2010)	Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pengelolaan Keuangan	Penerapan sistem pengelolaan keuangan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan	Sedangkan penulis lebih akan memfokuskan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kota Sukabumi

Mengacu pada uraian di atas, memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka pada penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya pelaksanaan keuangan daerah di BPKD Kota Sukabumi.
2. Penerapan sistem informasi yang belum optimal terhadap pengelolaan keuangan daerah di BPKD Kota Sukabumi.
3. Belum efektifnya peraturan pemerintah tentang keuangan di pemerintah (pusat).
4. Lemahnya pengawasan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah.
5. Masih tidak praktisnya penyaluran dana yang berasal dari APBD.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang di atas, maka pada penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal di Kantor BPKD Kota Sukabumi?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKD Kota Sukabumi?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKD Kota Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal di Kantor BPKD Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKD Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKD Kota Sukabumi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Bagi Penulis

Pada penelitian ini, penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta pemahaman yang lebih baik lagi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya audit internal yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai audit internal dan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun mengenai informasi dan data yang konkrit untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Pada penelitian ini, diharapkan perguruan tinggi terutama dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi bisa memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan dan memberikan masukan yang berharga mengenai judul terkait khususnya audit internal serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dijadikan titik tolak untuk penelitian selanjutnya.